

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Basit
NIM : 172022039
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul “Pemikiran Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut Tentang Hukum Poligami” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 11 maret 2021

Saya yang menyatakan,

Abdul Basit

NIM : 172022039

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **PEMIKIRAN RASYID RIDHA
DAN MAHMUD SYALTUT
TENTANG HUKUM POLIGAMI**

Nama : Abdul Basit

NIM : 172022039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 04 Juni 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam.

Serang, 21 Juni 2021

Direktur,

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum

NIP. 195908101990031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER

Tesis Berjudul : **PEMIKIRAN RASYID RIDHA
DAN MAHMUD SYALTUT
TENTANG HUKUM POLIGAMI**

Nama : Abdul Basit

NIM : 172022039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui oleh penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Anis Fauzi, MSI ()

Sekretaris : Dr. Purnama Rika Perdana, M.Hum ()

Penguji I : Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd ()

Penguji II : Dr. H. Ahmad Sanusi, MA ()

Pembimbing I : Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A, M.M ()

Pembimbing II : Dr. H Ahmad Hidayat, Lc, M. Ag ()

Diuji di Serang pada tanggal 04 Juni 2021

Waktu : 13.00 s/d 16.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
Di serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul :

PEMIKIRAN RASYID RIDHA DAN MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM POLIGAMI

Yang ditulis oleh :

Nama	: Abdul Basit
NIM	: 172022039
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Serang, 11 Maret 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. HMA. Tihami, MA
NIP. 195108151981031004

ABSTRAK

Judul Tesis : **“Pemikiran Rasyid Ridha Dan Mahmud Syaltut Tentang Hukum Poligami”** ditulis oleh Abdul Basit, NIM : 172022039, Jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Latar Belakang dalam penulisan ini bahwasannya telah terjadi pembaharuan dalam dunia Islam yang dibawa oleh para pembaharu seperti Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia pendidikan, seorang pakar ahli fikih, keduanya memiliki hubungan keilmuan dengan Muhammad Abduh. Keduanya adalah pemikir Islam namun memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum poligami. Dipilihnya kedua tokoh tersebut, selain dikarenakan ketertarikan penulisan di atas, juga karena memandang kepada kontribusi keduanya dalam bidang hukum Islam yang sangat besar dan keduanya dianggap sebagai pembaharu dalam dunia Islam. Selain itu, Dua tokoh ini dipilih dan tidak tokoh yang lainnya karena keduanya dianggap sebagai pembaharu yang ahli dalam bidang hukum yang memiliki kitab fatwa tersendiri dan dipilihnya kedua tokoh Mesir tersebut, tidak tokoh yang lain seperti Indonesia karena melihat keduanya adalah pembaharu dengan pemikiran yang baru dan orisinil, sedangkan pemikir-pemikir modern pada umumnya mengikuti pemikiran para pembaharu tersebut.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pemikiran Rasyid Ridha tentang hukum poligami? 2) Bagaimana pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum poligami? 3) Bagaimana analisis perbandingan pemikiran Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut tentang hukum poligami? 4) Bagaimana kontekstualisasi poligami perspektif Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut terhadap masyarakat Indonesia?.

Tujuan Penelitian adalah 1) Mengetahui pemikiran Rasyid Ridha tentang hukum poligami, 2) Mengetahui pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum poligami, 3) Mengetahui analisis perbandingan pemikiran Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut tentang hukum poligami, 4) Mengetahui kontekstualisasi poligami perspektif Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut terhadap masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan Dalam tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian Analisis Deskriptif komparatif. Metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa deskripsi dari suatu permasalahan berbahan dasar pusataka (*library research*). Sumber data ini diambil dari data-data kepustakaan baik dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya.yang kemudian di analisis hasilnya berupa sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian 1) Rasyid Ridha berpandangan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat dan ketentuan

yang amat berat, 2) Menurut pemikiran Mahmud Syaltut, hukum poligami diperbolehkan secara mutlak selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri, 3) Perbandingan pemikiran Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut tentang hukum poligami dianalisis dalam beberapa hal: Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa poligami merupakan masalah sosial klasik sudah ada sejak pra Islam. Keduanya mengharuskan adanya keadilan dalam setiap poligami. Rasyid Ridha menganggap bahwa poligami diperbolehkan sebagai *rukhsah* yang artinya poligami diperbolehkan dalam keadaan mendesak saja, sedangkan Syaltut berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam berbagai kondisi selama bisa berbuat adil, jika tidak bisa berbuat adil maka hanya boleh menikahi satu wanita saja. Rasyid Ridha lebih menjelaskan tentang sisi negatif dari poligami berupa ketidakmampuan pelakunya mendidik anak dari hasil poligami. Sesuai dengan kaidah usul fiqih: "*Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahah atau kebaikan.*" bahwa mafsadat menghindari/ Mencegah (risiko buruk) itu harus didahulukan daripada mengambil mashlahat yang ada pada poligami sesuai dengan konsep maslahat al ghazali, maka pengetatan pernikahan poligami karena pertimbangan pencegahan mudarat atau dampak negatif yang lebih besar yang muncul diakibatkan dari dampak dibukanya poligami secara lebar tanpa batasan. Sedangkan menurut kaidah Syaltut, sesuatu yang memiliki kebaikan atau sisi

positif yang lebih secara kualitas dan kuantitasnya dari pada kejelekannya, maka yang menjadi pegangan adalah sisi positifnya. UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rasyid Ridha (1865-1935) yang menyatakan bahwa asas pernikahan adalah monogami dan poligami kebolehnya diperketat dengan persyaratan-persyaratan lainnya berdasarkan masalah yang ada. 4) Ketika poligami dilonggarkan sebagaimana pendapat Syaltut maka banyak melahirkan banyak peluang-peluang poligami sirri yang menyebabkan tidak sedikit jatuhnya cerai gugut. Salah satu penyebab perceraian terbesar pasca-kemerdekaan adalah poligami. Beberapa fakta di lapangan menguatkan pendapat Ridha bahwa poligami diperketat karena memandang dampak yang dihasilkan dari pembolean poligami secara mutlak, hal ini didukung oleh mashlahat, Undang-Undang dan KHI, namun poligami juga tidak ditutup atau dihapus sama sekali karena poligami juga bisa menjadi solusi dalam beberapa kasus pernikahan seperti kasus kemandulan dan kurang suburnya seorang istri.

Kata Kunci : *Poligami, Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut.*

ABSTRACT

The title of the thesis: *Rasyid Ridha And Mahmud Syaltut's Thoughts On The Law Of Polygamy* was written by Abdul Basit, NIM: 172022039, Department of Islamic Family Law at UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

The background in this writing is that there have been reforms in the Islamic world brought by reformers such as Rashid Ridha and Mahmud Syaltut who are known as reformers in the world of education, a jurist, both of whom have a scholarly relationship with Muhammad Abduh. Both are Islamic thinkers but have different views on the law of polygamy. The choice of these two figures, in addition to the interest of the above writing, also because looking at the contribution of both in the field of Islamic law is very large and both are considered as reformers in the Islamic world. In addition, these two figures were chosen and not the others because they are both considered reformers who are experts in the field of law who have their own fatwa books and the two Egyptian figures were chosen, not other figures like Indonesia because they saw both of them as reformers with new and new ideas. original, while modern thinkers generally follow the ideas of these reformers.

The formulation of the problem in this study is 1) How does Rashid Ridha think about the law of polygamy? 2) What does Mahmud Syaltut think about the law of polygamy? 3) How

is the comparative analysis of Rashid Ridha and Mahmud Syaltut's thoughts on the law of polygamy? 4) How is the contextualization of polygamy from the perspective of Rashid Ridha and Mahmud Syaltut towards Indonesian society?

Research objectives are 1) To know Rashid Ridha's thoughts on the law of polygamy, 2) To know Mahmud Syaltut's thoughts on the law of polygamy, 3) To know the comparative analysis of Rashid Ridha and Mahmud Syaltut's thoughts on the law of polygamy, 4) To know the contextualization of polygamy from the perspective of Rashid Ridha and Mahmud Syaltut on Indonesian society.

Research Methods Used In this thesis the researcher uses the research method of comparative descriptive analysis. This method is used because the data used is a description of a problem based on library research. This data source is taken from the library data from both legislation, regulations, books, journals, and other sources. Which are then analyzed as a result in the form of a conclusion.

Research results 1) Rashid Ridha is of the view that Islam allows polygamy with very strict terms and conditions, 2) According to Mahmud Syaltut, the law of polygamy is allowed absolutely as long as there is no fear of persecution of wives, 3) Comparison of thoughts of Rashid Ridha and Mahmud Syaltut about the law of polygamy is analyzed in several respects: Rashid

Ridha and Mahmud Syaltut argue that polygamy is a classic social problem that has existed since pre-Islam. Both require justice in every polygamy. Rashid Ridha considers that polygamy is allowed as rukhsah which means that polygamy is allowed only in urgent circumstances, while Syaltut argues that polygamy is allowed in various conditions as long as it can do justice, if it cannot do justice then only one woman can be married. Rashid Ridha explained more about the negative side of polygamy in the form of the perpetrator's inability to educate children from the results of polygamy. In accordance with the rules of fiqh: "Avoiding harm is more important than taking maslahah or goodness." that the mafsadat of avoiding/ Preventing (bad risk) should take precedence over taking the mashlahat that exists in polygamy in accordance with the concept of maslahat al ghazali, then the tightening of polygamous marriages due to the consideration of harm prevention or greater negative impact that arises as a result of limitations. Meanwhile, according to the rules of Syaltut, something that has a good or positive side that is more in quality and quantity than in its ugliness, then what is the handle is the positive side. Law No. 1 of 1974 and KHI were strongly influenced by the thought of Rashid Ridha (1865-1935) who stated that the principle of marriage is monogamy and polygamy can be tightened with other requirements based on existing benefits. 4) When polygamy is relaxed as Syaltut's opinion, then many give birth to many opportunities for

polygamy sirri which causes not a little fall in divorce. One of the biggest causes of post-independence divorce is polygamy. Several facts in the field strengthen Ridha's opinion that polygamy is tightened because it sees the impact resulting from the absolute permissibility of polygamy, this is supported by mashlahat, Law and KHI, but polygamy is also not closed or abolished at all because polygamy can also be a solution in some marriage cases such as cases of infertility and infertility of a wife.

Keywords: *Polygamy, Rashid Ridha, Mahmud Syaltut.*

ملخص البحث

عنوان الرسالة: "أفكار رشيد رضا ومحمود شلتوت حول حكم تعدد الزوجات" بقلم عبد الباسط ورقم هوية الطالب: 172022039 في قسم الأحوال الشخصية في جامعة سلطان مولانا حسن الدين الإسلامية الحكيمة بنتن.

خلفية البحث أنه كان هناك تحديد في العالم الإسلامي أتى به المجددون مثل الشيخ رشيد رضا ومحمود شلتوت المعروفين بالمجددين في عالم التعليم ، وهما خبيران في الفقه ، ولكليهما علاقات علمية مع الشيخ محمد عبده . فكلاهما مفكر إسلامي لكن لهما وجهات نظر مختلفة حول حكم تعدد الزوجات. بصرف النظر عن اهتمام المؤلف بكليهما ، تم اختيار الشخصين لأن مساهمتهما في مجال الشريعة الإسلامية كبيرة جدًا و كلاهما يعتبران من المجددين في العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك ، تم اختيار هذين الشخصين عن الآخرين لأنهما يعتبران من الخبراء في مجال العلوم الشرعية ولديهما فتاوى خاصة واخترناهما من البارزين في مصر ولا من إندونيسيا لأنهما مجددان ولهما أفكار جديدة ، أصيلة ، بينما يتبع المفكرون الحديثون عمومًا أفكار هؤلاء المجددين .

مشكلات البحث (١) كيف تتكون أفكار رشيد رضا في حكم تعدد الزوجات؟ (٢) كيف تتكون أفكار محمود شلتوت في حكم تعدد الزوجات؟ (٣) كيف يتم التحليل المقارن لأفكار رشيد رضا ومحمود شلتوت في حكم تعدد الزوجات؟ (٤) كيف يتم وضع سياق تعدد الزوجات من منظور رشيد رضا ومحمود شلتوت تجاه المجتمع الإندونيسي؟

أهداف البحث (١) معرفة أفكار رشيد رضا في حكم تعدد الزوجات ، (٢) معرفة أفكار محمود شلتوت في حكم تعدد الزوجات ، (٣) معرفة التحليل

المقارن لأفكار رشيد رضا ومحمود شلتوت حول قانون تعدد الزوجات ، (٤) معرفة وضع سياق تعدد الزوجات من منظور رشيد رضا ومحمود شلتوت على المجتمع الإندونيسي

منهج البحث في هذه الرسالة استخدم الباحث أسلوب التحليل الوصفي المقارن. تُستخدم هذه الطريقة لأن البيانات المستخدمة في شكل وصف لمشكلة بناءً على مكتبة مركزية (مكتبة بحثية). مصدر البيانات هذا مأخوذ من البيانات، سواء من التشريعات واللوائح والكتب والمجلات وغيرها من المصادر ، ثم يتم تحليل النتائج في شكل خاتمة.

نتائج البحث (١) يرى رشيد رضا أن الإسلام يسمح بتعدد الزوجات بشروط وأحكام ثقيلة للغاية ، (٢) وفقاً لتفكير محمود شلتوت ، فإن حكم تعدد الزوجات مباح تماماً ما لم يكن هناك خوف من اضطهاد الزوجات ، (٣) يتم تحليل المقارنة بين أفكار رشيد رضا ومحمود شلتوت حول حكم تعدد الزوجات بعدة طرق: يجادل كل من رشيد رضا ومحمود شلتوت بأن تعدد الزوجات هو مشكلة اجتماعية كلاسيكية كانت موجودة منذ عصر ما قبل الإسلام. كلاهما يتطلب العدالة في كل تعدد الزوجات. يعتبر رشيد رضا أن تعدد الزوجات مسموح به كرخصة ، مما يعني أن تعدد الزوجات مسموح به فقط في حالة طارئة ، بينما يرى شلتوت أن تعدد الزوجات مسموح به في ظروف مختلفة طالما أنه يمكن أن ينصف الزوج ، وإن لم يكن بإمكانه تحقيق العدالة ، فيمكنه أن يتزوج امرأة واحدة. وأوضح رشيد رضا المزيد عن الجانب السلي لتعدد الزوجات من خلال عدم قدرة المتعدد على تثقيف الأطفال من نتائج تعدد الزوجات. وفقاً لقواعد الفقه: "درء المفسد مقدم على جلب المصالح". إن درء المفسد تقدم على أخذ المصلحة الموجودة في تعدد الزوجات وفقاً لمفهوم مصلحة الغزالي

، فإن تشديد الزواج المتعدد الزوجات يرجع إلى اعتبارات منع الضرر أو الآثار السلبية التي تنشأ نتيجة لذلك من تأثير فتح تعدد الزوجات على نطاق واسع دون قيود. وفي هذه الأثناء ، قال محمود شلتوت، إذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، فإنه لا يعتبر المفسدة حينئذ.

القانون الرقم ١ لعام ١٩٧٤ و مجموعة الأحكام الإسلامية في اندونيسيا تأثرت بشدة بأفكار رشيد رضا (١٨٦٥ - ١٩٣٥) الذي ذكر أن مبدأ الزواج هو الزواج الأحادي وأن تعدد الزوجات مسموح به مع المتطلبات الأخرى بناءً على المصالح الموجودة. ٤) عندما يتم تخفيف تعدد الزوجات ، كما يقول شلتوت ، فإنه يخلق العديد من الفرص لتعدد الزوجات بدون التوثيق الذي يؤدي إلى سقوط العديد من حالات الطلاق. وكان تعدد الزوجات يعد أحد أكبر أسباب الطلاق بعد استقلال اندونيسيا والعديد من الحقائق في هذا المجال يؤيد رأي رشيد رضا بأن تعدد الزوجات رخصة لأنه يرى التأثير الذي يمكن أن يحدثه تعدد الزوجات بشكل مطلق ، وهذا الرأي مدعوم بالمصالح والقانون و مجموعة الأحكام الإسلامية في اندونيسيا ، ولكن باب تعدد الزوجات أيضاً ليس مغلقاً أو ملغى تماماً لأن تعدد الزوجات يمكن أن يكون أيضاً حلاً في عدة حالات الزواج مثل حالات عقم الزوجة ومرضاها.

كلمات مفتاحية: تعدد الزوجات ، رشيد رضا ، محمود شلتوت.

MOTTO

Sabda Rasulullah:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ
، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

(HR. Al Baihaqi)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 :

Konsonan

<u>Konsonan</u>				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ل		ا		Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be

ت	تہ	تہ	ت	Ta	T/t	Te
ث	ثہ	ثہ	ث	Ṣa	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	جہ	جہ	ج	Jim	J/j	Je
ح	حہ	حہ	ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خہ	خہ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د		د		Dal	D/d	De

ذ	ذ	ذ	ذ	Żal	Ż/z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ر	ر	ر	Ra	R/r	Er
ز	ز	ز	ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	Şad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef

ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و		و		Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha

ء				Hamz ah	'	Apostrof
ي	ا	ا	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda apostrof (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih aksara	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A/a	A

◌ِ	<u>Kasrah</u>	I/i	I
◌ُ	<u>Dammah</u>	U/u	U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Alih aksara	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au/au	A dan u

Contoh

كَيْفَ *Kaifa*

حَوْلَ

Haula

Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Alih aksara	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Fathah dan <u>alif maqṣūrah</u></i>		
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ *Māta*

رَمَى *Ramā*

قِيلَ *Qīla*

يَمُوتُ *Yamūtu*

Ta marbūṭah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dengan *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ *Al-ḥikmah*

Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-Ḥajj*

نُعِمُّ *Nu‘‘ima*

عَدُوُّ *‘Aduww*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يّ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَلِيٌّ *‘Alī*

عَرَبِيّ

'Arabī

Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ

Al-Syamsu (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

Al-Zalzalāh (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ

Al-Falsafah

الْبِلَادُ

Al-Bilād

Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ *Ta'murūna*

النَّوْءُ *An-Nau'*

شَيْءٌ *Syai'un*

أَمْرٌ *Umirtu*

Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh, contoh:

- Fī Zilāl al-Qur'ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

Lafz al-Jalālah

Lafz al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal). Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun

dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi). Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi
lallażī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih
al-Qur’ān*
- Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī
- Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberi pemahaman manusia hal yang tidak diketahuinya dari alam ciptaan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi agung Muhammad Saw sebagai *Rasul* Allah yang diutus kedunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta. Demikian juga shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada para sahabat Nabi saw yang pemikiran mereka banyak dijadikan rujukan oleh para generasi selanjutnya hingga hari akhir.

Rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan juga ke *hadirat* Allah swt yang telah memberikan *inayah* kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan lancar tanpa ada halangan yang betul-betul mengganggu selama dalam proses penulisan.

Sehubungan dengan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis adalah mahluk biasa yang lemah dan tidak luput dari kesalahan, sehingga penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., sebagai rektor UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum, sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
3. Bapak Prof. Dr. H. M.A Tihami, M.A.,M.M, sebagai pembimbing I dan bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.Ag sebagai pembimbing II.
4. Bapak Dr. Dede Permana, M.A., Sebagai ketua Program Studi Hukum keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen yang mengajar kuliah di Pascasarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Seluruh staff dan pegawai Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan doanya yang terus mengalir.

9. Istri yang senantiasa mengingatkan, membantu, memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tidak ada ucapan yang dapat penulis kemukakan disini atas jasa-jasa mereka, kecuali sepenggal harapan semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah Swt. Demikian tesis yang penulis susun ini sekalipun masih belum sempurna namun harapan penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah kajian Hukum Keluarga Islam.

Serang, 11 maret 2021

Peneliti

Abdul Basit

NIM : 172022039

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	xvii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	xviii
KATA PENGANTAR	xxxii
DAFTAR ISI	xxxv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	52

I. Sistematika Pembahasan.....	56
--------------------------------	----

BAB BIOGRAFI RASYID RIDHA DAN MAHMUD

II: SYALTUT.....	58
A. Biografi Rasyid Ridha	58
1. Latar Belakang Keluarga.....	58
2. Latar Belakang Pendidikan.....	63
3. Latar Belakang Sosial-Politik.....	70
4. Aktifitas Intelektual.....	76
5. Karya-Karya.....	86
B. Biografi Mahmud Syaltut.....	89
1. Latar Belakang Keluarga.....	89
2. Latar Belakang Pendidikan.....	90
3. Latar Belakang Sosial-Politik.....	91
4. Aktifitas Intelektual.....	96
5. Karya-Karya.....	104

BAB TINJAUAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI

III : DALAM ISLAM.....	114
A. Pengertian Poligami.....	114
B. Tujuan Poligami	121
C. Sejarah Poligami.....	124
D. Konsep dan Hukum Poligami dalam Islam	133
E. Dasar Hukum Poligami.....	144
F. Syarat poligami.....	160
G. Hikmah Poligami.....	179

A. Kesimpulan.....	240
B. Saran.....	245
BIBLIOGRAFI.....	247
BIOGRAFI PENULIS	